

Program Peningkatan Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (*National Defense Program Guideline*) pasca masuknya dukungan dari AS

Ida Bagus Gandhi Maheswara¹⁾, Suksma Susanti²⁾, Idin Fasisaka³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: maheswara.gandhi@gmail.com¹⁾, suksma.susanti@gmail.com²⁾, idin.fasisaka@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This thesis discusses the development of the Japanese Military Enhancement Program in the Asia Pacific region through NDPG after the inclusion of support from the US. This research will only focus on how the improvement of the Japanese military after the entry of US support succeeded in establishing cooperation with Japan. This paper uses two concepts, namely the concept of alliances and national interests. Both countries have a level of strength against the military. Japan itself is known to have power in Asia and the Pacific, while America has become the strongest military force in the world to date. The two countries then fellowship one of the objectives is to achieve their interests. Japan has become one of the focuses of this writing, where Japan is seeking assistance from the United States because of threats from surrounding countries.

Keywords: NDPG (*National Defense Program Guideline*), Alliance, National Interest.

1. PENDAHULUAN

Dalam dinamika studi kawasan, Asia Pasifik merupakan salah satu region yang penting dan berpengaruh. Asia pasifik memiliki area yang besar dan kaya akan sumber daya alam. Dalam perkembangannya kawasan Asia Pasifik umumnya mengalami dinamika yang pesat setelah perang dingin. Kawasan Asia-Pasifik setelah Perang Dingin, memiliki peningkatan persaingan yang menyangkut beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, dimana dikenal dengan identitasnya sebagai negara berkembang. Dinamika tersebut meliputi beberapa aspek, seperti dalam perekonomian, pertahanan dan keamanan negara, pembangunan, bahkan hingga ke *human right* serta sistem politik yang demokrasi.

Perkembangan sejarah persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia tidak dapat dilepaskan dari persaingan untuk menguasai wilayah lautan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan

dari urgensi wilayah laut sebagai matra untuk menjamin eksploitasi sumber daya yang ada didalamnya, jalur perdagangan serta pengamanan terhadap wilayah daratannya. Sejalan dengan munculnya berbagai gangguan dan ancaman, maka berbagai upaya pun dilakukan untuk menciptakan keamanan wilayah lautan yang berupa wilayah teritorial sebuah negara maupun di wilayah lautan lepas untuk kepentingan negara maupun masyarakat internasional (Rachmat, 2015 : 160).

Jepang mulai berpikir lebih dinamis seiring berjalannya waktu terutama dalam hal pertahanan nasionalnya. Seperti dalam NDPO (*National Defense Program Outline*) tahun 1976, dalam prinsipnya Jepang terfokus pada perdamaian dunia dan kestabilan antar negara terutama dalam permasalahan blok barat dan blok timur. Begitu pula dalam perombakan NDPG tahun 1995, prioritas utama dalam pertahanannya dimaksimalkan terhadap keamanan internasional pasca perang dingin. Hal tersebut tidak selamanya relevan terhadap kondisi lingkungan yang semakin

maju. Dengan melihat kemungkinan baru dinamika keamanan kawasan, secara langsung Jepang dituntut untuk memperbarui program pertahanannya menjadi NDPG (*National Defense Program Guideline*). Dari kebijakan yang ada diharapkan mampu memberikan poin-poin yang lebih kompleks, terperinci dan sesuai dengan perkembangan permasalahan global.

Sebagai pendukung dari tujuan tersebut ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh Jepang diantaranya fokus dan percaya terhadap kekuatan nasionalnya sendiri, membentuk kerjasama dengan negara besar, serta aktif dalam komunitas internasional. Kembali pada perubahan kondisi keamanan internasional yang semakin lama semakin kompleks khususnya modernisasi militer yang diperlihatkan oleh China.

Beberapa poin diatas menjadi alasan Amerika menjalin kerjasama dengan Jepang, melihat peran Jepang yang tidak sembarang di Asia Pasifik memantapkan Amerika untuk menjalin kerjasama. Jepang merasa kerjasama dengan AS juga akan menguntungkan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai dampak NDPG tersebut untuk Jepang pasca adanya dukungan dari Amerika Serikat, dalam kurun waktu 2013–2018. Ketika lingkungan keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin parah akibat negara-negara di Asia Pasifik yang mencoba untuk mendominasi dan Amerika Serikat sementara itu mempertahankan dan memperkuat keterlibatan serta kehadirannya di kawasan Asia Pasifik, telah menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memperkuat Aliansi Jepang-AS untuk keamanan Jepang (Defense of Japan, 2018).

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Literatur yang dijadikan bahan dalam mendukung penelitian ini. Literatur yang pertama penulis gunakan adalah tulisan dari Fajrian Eka

Budi Darmawan "Dampak kerjasama militer Amerika Serikat-Taiwan terhadap hubungan Amerika Serikat-Cina. Tulisan ini memaparkan bagaimana dampak dari kerjasama serta dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan dalam meningkatkan militer Taiwan. Meningkatnya kekuatan ekonomi, militer dan pengaruh politik China membuat China kurang lebih dalam kurun waktu 30 tahun diprediksi menjadi kekuatan terbesar setelah Amerika Serikat. Pemerataan kekuatan militer yang dilakukan China mulai awal tahun 1990-an menegaskan bahwa kekuatan China merupakan kekuatan terbesar di Asia dan memenuhi ambisi China sebagai negara adidaya di kawasan Asia, namun ambisi China terasa begitu besar tekanannya karena dukungan Amerika Serikat dalam kekuatan militer Taiwan.

Kajian pustaka yang kedua berjudul *Japan – U.S Alliance as National Strategy* yang ditulis oleh Yumi Hiwatori (2006). Dalam tulisan ini menjelaskan secara garis besar mengenai kepentingan nasional dari masing-masing negara. Secara bentuk geografik dari wilayah Jepang memiliki garis pantai yang panjang, banyaknya pulau-pulau kecil, populasi yang tinggi, dan fasilitas penting yang berada pada daerah pesisir. Apabila dilihat dari segi ekonomi, Jepang menjadi negara kedua dengan tingkat ekonomi GDP terbesar sekitar US\$4.80 triliun tahun 2005. Namun kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Jepang sangat bergantung pada impor kebutuhan seperti minyak dan makanan. Rasio swasembada energi hanya 16% termasuk produksi energi nuklir tahun 2003.

Dalam hal lingkungan keamanan disekitar Jepang, terutama setelah berakhirnya perang dingin, militer dalam intensitas yang besar termasuk dalam persenjataan nuklir terus terjadi dalam ruang lingkup wilayah tersebut. Sejumlah negara berupaya untuk mengidentifikasi kekuatan militer mereka termasuk situasi di wilayah semenanjung

Korea yang tidak dapat diprediksi. Hal penting lainnya mengenai PRC yang saat itu sedang berusaha untuk memordenisasi kekuatan nuklir dan kapabilitas misil serta angkatan laut dan angkatan udaranya. PRC juga mengembangkan operasinya di wilayah laut. Hubungan Jepang-PRC saat itu juga membingungkan, menjadikan ketergantungan Jepang semakin meningkat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa zona maritim di Laut Barents antara Rusia dan Norwegia melalui konsep yang dijabarkan di atas melalui interpretasi data-data atau informasi yang diperoleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal, berita, laporan, situs resmi terkait isu penelitian. Teknik penyajian data yang digunakan merupakan penyusunan sekumpulan data yang telah didapatkan dan direduksi yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks atau narasi, tabel, serta gambar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terletak di paling timur Asia Timur, Jepang berbatasan dengan laut dan negara-negara Asia Timur lainnya. Di pesisir barat, wilayah laut Jepang terletak di antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Selain itu, Cina terletak di sebelah pulau-pulau di sebelah barat daya Jepang, dipisahkan oleh Laut Cina Timur. Dengan permusuhan historis dengan beberapa tetangga Asia Timur Jepang dan perselisihan wilayah, dikombinasikan dengan ekspansi maritim China, dan ancaman rudal dan

nuklir Korea Utara, Jepang memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan dalam lingkungan strategisnya (Ministry of Defense, Japan, 2004).

Analisis tentang Korea Utara dan Cina sebagai ancaman yang dirasakan oleh Jepang didasarkan pada analisis dari beberapa penulis. Penulis mendasarkannya pada kombinasi unsur ancaman Barry Buzan, Robert O. Tilman, dan Janice Gross Stein (*structural, geopolitics, social cultural, economy, and historical*) serta tingkat penilaian ancaman oleh Ole Elgström (*specific/diffuse, immediate/remote, probability/severe*). Hal ini juga bisa menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional atau ancaman jarak jauh yang tidak mengancam. Terakhir, dimensi ancaman mungkin dalam bentuk jangka pendek (probabilitas) atau dalam jangka panjang (dalam artian parah).

Cina juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional Jepang, yang dimensi strukturalnya spesifik, mungkin, dan parah. Rezim Tiongkok di bawah Xi Jinping lebih tegas, terutama dalam ekspansi maritimnya (Matsuda, 2014) dan telah meningkatkan lebih banyak tekanan ke Jepang baik melalui aktivitas Laut Cina Timur dan yang di Laut Cina Selatan (Dingli et al., 2016). Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa dalam hal sistem geopolitik, sejarah, dan dimensi sosial-budaya, Cina dianggap sebagai ancaman bagi Jepang yang spesifik, segera, dan kemungkinan besar dan parah. Ini karena kedekatan Cina sangat dekat dengan Jepang, sementara ukurannya sangat besar. Permusuhan historis telah menunjukkan banyak darah buruk di antara kedua negara. Ancaman Beijing dicontohkan dengan kebangkitan ekonomi negara yang cepat (Kementerian Pertahanan, Jepang, 2015) dan hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Masalah energi dan ekonomi publik Jepang adalah sebuah contoh masalah yang menimbulkan

tantangan serius bagi Jepang dan negara-negara lain di tahun 1970-an dan 1980-an. Melalui sejumlah pilihan kebijakan yang disengaja di tahun 1970-an, Jepang berhasil membangun fondasi untuk pertumbuhan masa depan ekonomi tanpa meningkatkan konsumsi energi. Demikian juga pada tahun 1980-an, Jepang berhasil mengurangi lemahnya defisit publik secara dramatis. Tahun 1980-an juga menjadi pergeseran secara besar-besaran dalam kekuatan yang relatif antara Amerika Serikat dan Jepang, sebagai contoh adalah kemampuan ekonomi dan technomiliter Jepang. Di Asia sendiri terdapat tanda-tanda orientasi regional yang tumbuh didorong oleh saling ketergantungan ekonomi yang lebih besar dan penurunan relatif dilihat dari posisi ekonomi AS yang dihadapkan dengan Jepang dan negara-negara industri baru.

Jepang baru-baru ini melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah investasi asing langsung (FDI) terbesar di Asia. Dan menurut Dewan Perdagangan Luar Negeri Jepang, Asia menyusul Amerika Serikat sebagai pasar ekspor terbesar Jepang pada tahun 1991 (Fur Eastern Economic Review, 25 Juli 1991, 91). Sebagian besar ekspansi perdagangan ini berasal dari peningkatan besar permintaan barang modal Jepang setelah ekspansi investasi asing Jepang yang cepat di Asia. Jepang juga menyediakan lebih banyak bantuan keuangan dan pinjaman kepada Asia daripada Amerika Serikat dan sedang mencari peran yang lebih besar dalam Bank Pembangunan Asia (Friedland 1988; Awanohara 1991).

Masih mengandalkan aliansi keamanan A.S, Jepang dapat berkonsentrasi pada langkah-langkah *soft-power*, seperti bantuan pembangunan, investasi asing langsung dan tidak langsung, serta promosi budaya. Mempertimbangkan perubahan signifikan di Kawasan Asia-Pasifik, yang terjadi setelah Perang Dingin, Jepang telah melakukan

langkah-langkah untuk mendefinisikan kembali kebijakan keamanannya. Dalam kenyataan baru, bercita-cita untuk mengambil alih peran pemimpin regional, otoritas Jepang dihadapkan pada jenis ancaman baru - kekuatan ekonomi dan militer China yang meningkat, ancaman nuklir Korea Utara dan sekarang bahkan kebijakan luar negeri "aktif" Rusia. Desember 2013 menandai titik balik penting dalam kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang yang terus berkembang.

Abe sebagai peserta ShangriLa ke-13 di Singapura menggambarkan perubahan lingkungan keamanan di abad ke-21, menyatakan bahwa Wilayah Asia Pasifik telah mengalami perubahan pembangunan besar hanya dalam satu generasi. Sayangnya, sebagian besar dari pertumbuhan ini dihabiskan untuk keperluan militer dan transaksi senjata. Namun, anggota ASEAN meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan memodernisasi angkatan bersenjata mereka sebagai tantangan untuk meningkatkan kekuatan regional - Republik Rakyat Tiongkok. Juga sekutu AS di sebelah timur - Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, tidak tetap tenang dan menyesuaikan anggaran mereka dengan tantangan baru di bidang keamanan nasional. Tantangan keamanan regional khusus untuk keamanan nasional Jepang yang dibahas dalam NSS dan NDPG bukanlah hal baru, dan termasuk pengembangan Rudal Balistik dan nuklir Korea Utara serta modernisasi militer China dan kegiatan intensifnya di laut dan wilayah udara di sekitar Jepang.

Namun, kekawatiran yang semakin meningkat tentang menjaga supremasi hukum di laut yang tampaknya menjadi kepentingan utama bagi administrasi Abe. Persepsi bahwa Beijing berusaha untuk secara sepihak mengubah status quo dengan paksaan, mengabaikan hukum internasional dan melanggar kebebasan navigasi, merujuk pada perselisihan Jepang dengan Cina

mengenai Kepulauan Senkaku (Diayou) di Laut Cina Timur. Pemerintah Abe memandang perilaku China secara keseluruhan sebagai 'masalah yang memprihatinkan bagi masyarakat internasional, termasuk Jepang. Kesimpulan keseluruhan, oleh karena itu, adalah bahwa lingkungan keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin tegang. Prinsip-prinsip inti dari keamanan nasional Jepang, seperti yang diperkenalkan pada tahun-tahun pasca perang, dikatakan tetap tidak berubah. Hal ini termasuk mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada pertahanan secara eksklusif, tidak menjadi kekuatan militer yang mengancam negara lain, dan mematuhi tiga prinsip non-nuklir: tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak memperkenalkan senjata nuklir di negara ini. Pesan utama yang ingin dikirim oleh pemerintahan Abe adalah salah satu dari kesinambungan: Jepang tetap negara yang cinta damai.

Pergeseran NSS menuju pasifisme proaktif berupaya membuat jalan untuk bagi Abe untuk bergerak maju dalam inisiatif kebijakan ini. Pembeneran untuk langkah Tokyo menuju aktivisme keamanan, seperti yang dibahas dalam NSS, termasuk lingkungan keamanan 'parah' yang dihadapi Jepang dan keyakinan pemerintahan Abe bahwa masyarakat internasional mengharapkan negara itu untuk menjadi kontributor aktif perdamaian internasional. Selain itu, pengejaran kepentingan nasional Tokyo yang sukses - seperti menjaga kedaulatan dan mencapai kemakmuran - dipandang terkait langsung dengan upaya negara di bidang kerja sama internasional. Sejalan dengan pemikiran ini, tujuan keamanan nasional Abe menekankan - selain untuk mencegah ancaman mencapai Jepang (tingkat nasional) dan meningkatkan situasi keamanan regional di Asia-Pasifik (tingkat regional) - Peran Tokyo dalam keamanan global dan dalam membangun sebuah kandang yang stabil. komunitas internasional (tingkat global).

Meskipun NSS menyebutkan penguatan diplomatik Jepang kreativitas dan kekuatan 'lunak' (atau non-militer) serta perannya dalam organisasi internasional, bobot dari pendekatan strategis ini tampaknya ditempatkan pada peningkatan kemampuan militer negara itu, yaitu kekuatan 'kerasnya'. Dokumen ini memperkenalkan konsep 'defense kekuatan pasukan bersama dan sangat efektif', yang menekankan operasi kolaboratif di antara tiga cabang Pasukan Bela Diri (SDF), yaitu SDF Darat, Maritim dan Udara. 'Kekuatan pertahanan gabungan dinamis' yang baru ini akan dilengkapi dengan teknologi canggih dan mampu mencegah beragam ancaman, serta merespons dengan cepat dan terintegrasi berbagai kontinjensi. Ini dapat mencakup, misalnya, potensi pendudukan oleh pasukan musuh dari pulau terpencil. Skenario semacam itu telah dipertimbangkan oleh pemerintah Abe: pada bulan April 2013, ia mengadopsi cetak biru lima tahun untuk melindungi kepentingan maritim bangsa, sebagian sebagai tanggapan terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Timur. Dalam hal ini, NSS menyebutkan bahwa pendekatan strategis Jepang terhadap keamanan nasional dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar: memperkuat kemampuan dan peran Jepang sendiri; meningkatkan aliansi AS-Jepang; dan bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas global. Pemikiran strategis pemerintahan Abe mengungkapkan gambaran komprehensif kebijakan diplomatik dan pertahanan serta pemanfaatan berbagai sumber daya yang dirancang untuk mengatasi tantangan di tiga tingkat yang disebutkan di atas nasional, regional dan global. Jepang akan melindungi dan mengembangkan pulau-pulau terpencil di dekat perbatasan nasional serta memeriksa situasi kepemilikan tanah di daerah-daerah tersebut.

Dimensi maritim kepentingan nasional Jepang digarisbawahi dan tercermin dengan baik dalam sifat kemampuan yang akan ditingkatkan dan

kemungkinan khusus yang harus ditangani. Yang pertama termasuk, misalnya, kemampuan untuk pengawasan maritim dan penegakan hukum serta pengembangan SDF kemampuan amfibi penuh yang akan diperlukan - dalam pandangan administrasi Abe - untuk potensi penangkapan kembali pulau yang diduduki. Kontinjensi utama termasuk memastikan keamanan laut dan wilayah udara di sekitar Jepang dan menanggapi invasi pulau lepas pantai, bersama dengan respons terhadap serangan dan ancaman misil balistik di dunia maya.

Pada 17 Desember 2014, Pemerintah Jepang merilis dua dokumen utama untuk kebijakan keamanan nasional: Strategi Keamanan Nasional atau *National Security Strategy* (NSS) dan Pedoman Program Pertahanan Nasional atau *National Defense Program Guideline* (NDPG) yang baru. NDPG mengusulkan strategi dan kebijakan pertahanan Jepang untuk mengimplementasikan strategi termasuk struktur dan postur Pasukan Bela Diri (SDF) dengan rentang waktu setidaknya sepuluh tahun. NDPG pertama dikeluarkan pada tahun 1976 dan Pemerintah Jepang telah merevisinya pada tahun 1995, 2004 dan 2010.

NDPG baru memiliki beberapa karakteristik seperti misalnya adalah NDPG pertama yang dikembangkan berdasarkan dokumen baru, yaitu *National Security Strategy* itu berisi beberapa frasa kunci seperti kontribusi proaktif terhadap perdamaian, Angkatan Pertahanan Gabungan Dinamis, dan tanggapan yang mulus terhadap berbagai situasi termasuk apa yang disebut situasi *grey zone*; dan itu memberikan pertimbangan serius pada dua faktor terpenting dalam lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik, kebangkitan Cina dan penyeimbangan kembali AS terhadap kawasan tersebut. Poin pertama yang dibuat tentang karakteristik NDPG baru adalah berkaitan dengan proses penyusunan. NDPG 2013 dirilis bersama

dengan Strategi Keamanan Nasional pertama pemerintah Jepang yang menggambarkan konteks yang lebih luas yang mencakup strategi pertahanan. Strategi dan kebijakan pertahanan untuk mengimplementasikannya secara umum harus sesuai dengan konteks yang lebih luas dari strategi keamanan nasional. Dalam kasus Amerika Serikat, strategi keamanan nasional dikeluarkan di tingkat presiden yang mengarah ke strategi pertahanan nasional di tingkat Sekretaris Pertahanan yang diikuti oleh Ketua Kepala Staf Gabungan mengembangkan strategi militer nasional. Strategi Militer Nasional menetapkan konteks strategis untuk strategi bawahan seperti yang dari kepala dinas (angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, marinir) dan komandan bersatu (Komando Pasifik dan sebagainya).

Di masa lalu, perencana yang bekerja pada NDPG harus menduga apa yang akan digambarkan oleh strategi keamanan nasional. Walaupun NSS 2013 mungkin tidak sempurna karena ini adalah percobaan pertama untuk pemerintah Jepang, NSS 2013 menyediakan strategi dan kebijakan pertahanan dengan konteks yang lebih luas di mana perencana pertahanan bersama dengan mereka yang bekerja di bidang diplomatik, ekonomi, dan berbagai aspek keamanan nasional lainnya akan dapat memahami peran pertahanan dalam keamanan nasional secara keseluruhan. Perubahan dalam proses pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan ini akan memastikan bahwa mereka sejalan dengan semua aspek lain dari strategi keamanan pemerintah Jepang seperti yang terkait dengan diplomasi, perdagangan, dan perdagangan, seraya menyesuaikannya dengan gambaran yang lebih luas tentang strategi keamanan nasional.

Ini dapat diperkuat lebih lanjut dengan kebijakan lain yang diambil pemerintahan Abe untuk membentuk versi Jepang Dewan Keamanan

Nasional dan staf tetapnya. NSC yang baru didirikan yang dirancang untuk berfungsi sebagai menara kendali kebijakan keamanan Jepang akan memungkinkan pemerintah Jepang untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan keamanan dengan cara yang jauh lebih komprehensif daripada sebelumnya. Poin kedua yang berkaitan dengan NDPG baru terkait dengan salah satu frase kunci yang ditemukan dalam dokumen, "*proactive contribution to peace*". Baik NSS dan negara NDPG baru bahwa "Jepang akan berkontribusi lebih aktif daripada sebelumnya untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia, "mengikuti" kebijakan 'Berkontribusi Secara Proaktif terhadap Perdamaian' berdasarkan kerja sama internasional. "Sejak 1991, ketika pemerintah Jepang mengirim penyapu ranjau Angkatan Laut Pasukan Bela Diri (MSDF) ke Teluk Persia setelah Perang Teluk, dan 1992, ketika Jepang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian PBB (PBB PKO) di Kamboja, SDF telah aktif dalam misi PBB PKO, bantuan kemanusiaan / bantuan bencana (HA / DR) dan misi rekonstruksi pasca-konflik. Akan tetapi, dalam hal status hukum, misi-misi ini telah dikategorikan sebagai kegiatan lain-lain yang bertentangan dengan misi primer hingga 2007, ketika undang-undang SDF direvisi untuk membuat daftar kegiatan kerja sama internasional sebagai misi utama bersama dengan misi SDF kunci lainnya seperti pertahanan Jepang. NDPG baru yang menyatakan bahwa Jepang harus berkontribusi secara proaktif untuk perdamaian, menempatkan misi internasional SDF dengan tepat di pusat kebijakan keamanan nasional.

Poin ketiga yang berkaitan dengan NDPG baru berkaitan dengan frase kunci lain, yaitu Angkatan Pertahanan Gabungan Dinamis. NDPG baru, dengan penekanan pada "peningkatan postur pertahanan di wilayah barat daya" menyatakan bahwa prioritas SDF harus ditempatkan pada

kemampuan untuk memastikan "keunggulan maritim dan udara, yang merupakan prasyarat untuk pencegahan dan respons yang efektif dalam berbagai situasi" dan kemampuan untuk mengerahkan dan menggerakkan pasukan. NDPG juga menyatakan bahwa SDF akan mengembangkan kemampuan amfibi penuh. NDPG baru menggambarkan peran pertahanan dalam konteks komprehensif Strategi Keamanan Nasional, dan menggambarkan strategi pertahanan dan kebijakan untuk mengimplementasikannya. Dokumen ini juga luar biasa dalam menyatakan keterlibatan aktif Jepang dalam upaya internasional untuk perdamaian dan stabilitas dunia dengan slogan sebagai kontributor proaktif untuk perdamaian.

Istilah *Joint Dynamic Defense Force* juga mewakili apa yang menjadi tujuan SDF untuk struktur kekuatan masa depan dan posturnya. Dalam hal operasi SDF, NDPG memperjelas bahwa pentingnya diberikan kepada respon *Seamless* untuk kerja sama yang lebih lancar antara berbagai pelaku yang berbeda yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kontinjensi dan transisi yang lebih mulus ke dan dari berbagai fase krisis. Kuncinya adalah bagaimana menerapkan ide-ide ini. Misalnya, kemampuan amfibi seperti yang diusulkan oleh NDPG akan mengambil sejumlah besar upaya untuk mengimplementasikan termasuk: sumber daya keuangan untuk pengadaan peralatan dan untuk manusia dengan orang-orang yang cakap; upaya intelektual untuk mengembangkan doktrin operasional; dan pelatihan besar-besaran untuk individu dan unit agar siap untuk operasi yang kompleks tersebut.

Menetapkan dasar hukum untuk operasi SDF yang disebutkan sebelumnya juga akan mengambil cukup banyak pekerjaan rajin di tingkat birokrasi dan akan membutuhkan aset politik pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan. Kuncinya

adalah kerja keras untuk implementasi. Sejalan dengan upaya-upaya ini, sangat penting bagi pemerintah Jepang untuk melakukan upaya serius untuk mengoordinasikan kebijakan keamanannya dengan kebijakan Amerika Serikat. Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat berupaya merevisi *Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation* seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kedua pemerintah harus mengambil kesempatan emas ini untuk membandingkan persepsi ancaman dan menyesuaikan prioritas kebijakan masing-masing.

NSS (*National Security Strategy*) adalah yang pertama bagi Jepang dalam hal kebijakan mengenai keamanan nasional yang berfokus pada urusan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Ini menguraikan pendekatan mana yang harus diambil Jepang sesuai dengan pandangan jangka panjang kepentingan nasionalnya. NSS menggantikan Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional atau *Basic Policy on National Defense* yang sebelumnya digunakan Jepang sebagai dasar kebijakan pertahanannya. Pada gilirannya, NSS digunakan sebagai dasar untuk NDPG dan keduanya dirancang untuk dekade berikutnya. NDPG dirancang untuk pandangan jangka menengah dan panjang dan *Medium Term Defense Program*(MDTP) menyoroti batas anggaran dan total akuisisi peralatan pertahanan dalam periode lima tahun ke depan untuk mencapai postur pertahanan dan kemampuan seperti yang telah digariskan dalam NDPG. *Japan National Security Council*(NSC) bersama dengan kebijakan dasar asing dan pertahanan lainnya mengenai keamanan nasional Jepang menciptakan NDPG. NSC didirikan pada November 2013 berdasarkan Undang-Undang revisi parsial pembentukan dewan keamanan. NSS, NDPG, dan MTDP kemudian menjadi dasar untuk menentukan anggaran tahunan Jepang dan menyesuaikannya berdasarkan situasi yang relevan.

NSS Jepang dibangun berdasarkan prinsip kontribusi proaktif untuk perdamaian berdasarkan prinsip kerjasama internasional sebagai basisnya, diuraikan dalam *Defense WhitePaper*(2015), di mana Tokyo menegaskan kembali dirinya sebagai pemain utama dalam politik internasional dan sebagai perdamaian. negara yang penuh kasih untuk mencari keamanan dan kedamaian serta keamanannya sendiri di kawasan Asia-Pasifik. Jepang juga meyakini dirinya sebagai 'kontributor aktif untuk dama' melalui prinsip dasar kerja sama internasional, dan dengan demikian akan memberikan 'lebih dari sebelumnya untuk perdamaian, keamanan dan kemakmuran masyarakat internasional' (Kementerian Pertahanan, Jepang, 2014).

NDPG yang baru memiliki tiga ide dasar tentang bagaimana Jepang harus menanggapi tantangan-tantangan. Pertama, dari perspektif temporal, NDPG menekankan tanggapan mulus terhadap setiap krisis atau kontinjensi. Dengan kata lain, Jepang akan merespons tantangan dari masa damai ke zona abu-abu kemudian konflik. Kedua, dari perspektif spasial, Jepang akan menanggapi tidak hanya domain tradisional tetapi juga domain baru yang muncul. Selanjutnya, Pasukan Bela Diri (SDF) akan menanggapi tantangan-tantangan ini melalui operasi lintas domain. Selain itu, NDPG mementingkan seluruh pemerintahpendekatan. Ketiga fitur ini disorot dengan jelas dalam dokumen baru. Berdasarkan pengakuan yang disebutkan dalam Bagian I NDPG, mari kita pertimbangkan seberapa baik NDPG mengatasi tantangan ini. NDPG mengkristal ancaman baru yang muncul: Lingkungan keamanan di sekitar Jepang berubah dengan sangat cepat. Perubahan keseimbangan kekuatan komunitas internasional semakin cepat. Selain itu, perluasan cepat area baru seperti ruang, ruang cyber, dan gelombang elektromagnetik secara fundamental mengubah cara keamanan negara telah difokuskan dalam berurusan dengan

darat, laut, dan udara. Berkenaan dengan dunia maya, dalam Bagian IV 'Prioritas untuk Memperkuat Kemampuan Pertahanan, pedoman mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, Kementerian Pertahanan akan secara drastis memperkuat kemampuan ruang dunia maya, seperti kemampuan untuk mencegah dan mengganggu penggunaan dunia maya. oleh pihak lain dalam serangan ke Jepang. Kalimat ini secara implisit berarti bahwa SDF mungkin memiliki kemampuan serangan di ruang cyber. Namun, pedoman tersebut tidak menjelaskan sejauh mana SDF dapat menanggapi serangan cyber pada infrastruktur sektor sipil. Mengenai bencana alam, pedoman menyatakan bahwa "Jepang rentan terhadap bencana alam yang menyebabkan kerusakan parah. Konsentrasi infrastruktur industri, populasi dan informasi di daerah perkotaan Jepang, dan sejumlah besar fasilitas penting seperti pembangkit listrik tenaga nuklir berlokasi di daerah pantai. Bagan menunjukkan perbandingan NDPG 2013 dan 2018 dan penggunaan kata "*joint*," "*space*," "*cyber*," dan "*operation*" di kedua dokumen. Diagram ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam dokumen baru, kata "ruang" dan "cyber" digunakan tiga kali lebih sering dibandingkan dengan dokumen sebelumnya. Pedoman baru dengan demikian mengatasi lingkungan keamanan yang terus berubah ini, sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya.

3. KESIMPULAN

Ada banyak yang harus dirayakan dalam dokumen strategis 2018. Jepang jelas lebih serius menghasilkan kapabilitas nyata dan menggunakan dana terbatasnya untuk memberikan efek. Yang mengatakan, beberapa masalah luar biasa tetap ada, dan ini jelas merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Masalah dengan

kebersamaan dan pertanyaan tentang strategi untuk memasukkan isu-isu yang terkait dengan stabilitas krisis serta kemandirian militer memerlukan perhatian lebih lanjut. Meskipun di luar lingkup makalah ini, penting untuk dicatat bahwa aspek-aspek kritis dari sistem militer AS, khususnya hubungan komando yang berkaitan dengan pertahanan Jepang, juga merupakan warisan dari masa lalu dan sama-sama dipengaruhi oleh kombinasi inersia dan birokrasi politik. Mengingat tantangan yang berkembang yang dihadapi aliansi, pemikiran strategis yang hati-hati dan tindakan tegas akan sangat penting bagi kedua anggota aliansi.

Sistem internasional telah stabil selama tujuh puluh tahun terakhir. Itu dirancang oleh Amerika Serikat sebagian besar untuk tujuan pemulihan dari Perang Dunia II serta untuk mencegah perang internasional besar lainnya. Jepang menikmati manfaat dari sistem ini dan menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Asia Timur Laut dengan menandatangani Perjanjian Keamanan Jepang-AS pada tahun 1960. Setelah berakhirnya Perang Dingin, pihak-pihak tertentu telah melihat banyak perubahan dalam sistem, mulai dari disintegrasi Uni Soviet ke perang dagang saat ini antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (Cina). Untuk membahas Pedoman Program Pertahanan Nasional (NDPG) baru Jepang, perlu untuk melihat perubahan apa yang kita hadapi sekarang di bidang keamanan, politik, dan ekonomi. Tidak perlu dikatakan, NDPG baru itu sendiri tidak dapat memenuhi semua perubahan ini. Namun, penting untuk membahas kebijakan keamanan Jepang dari sudut pandang yang luas.

Lingkungan strategis Asia Timur Laut terus berkembang setelah munculnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara serta penumpukan militer Cina. Setelah kegagalan kebijakan keterlibatan pemerintahan Obama, pemerintahan Trump telah

mengambil pendekatan yang jauh lebih sulit terhadap Cina. Sistem global tidak berfungsi sebaik dulu karena perubahan struktur dunia. Sistem ini harus diperbarui untuk menghadapi realitas ekonomi baru dan untuk hidup berdampingan dengan China yang baru muncul. Karena Amerika Serikat tidak mau memperbaiki sistem global untuk stabilitas, maka perlu bagi Jepang dan sekutu Amerika lainnya untuk mengusulkan desain yang diinginkan untuk kawasan tersebut. NDPG yang baru adalah langkah pertama bagi Jepang untuk menunjukkan rasa berbagi tanggung jawab untuk stabilitas kawasan melalui kerja sama dengan negara-negara sahabat di kawasan itu.

4. DAFTAR PUSTAKA

(Rachmat, 2015 : 160) retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321867191_DINAMIKA_KEAMANAN_KAWASAN_ASIA_PASIFIK_DALAM_PERSAINGAN_KEKUATAN_MARITIM_CHINA_DAN_AMERIKA

Cossa, R A. The U.S Asia-Pacific Security Strategy for the Twenty-First Century, pada The Security Environment in The Asia-Pacific, (eds) Tien H & T. Cheng. New York: M.E. Sharpe & An East Gate Book, 2000.

Shambaugh, David & Yahuda Michael. International Relations of Asia (Asia in World Politics). New York: Rowman & Littlefields Publisher, Inc, 2009.

Zhao, S. (2013). Delicate Balance of Power in the Asia-Pacific: The Obama Administration's Strategic Rebalance and the Transformation of US-China Relationship. Economic and Political Studies, 110-113

Zhao, S. (2016). Delicate Balance of Power in the Asia-Pacific: The Obama Administration's Strategic Rebalance and the Transformation of US-China Relationship. Economic and Political Studies Vol. 1, No.2, 109-133.

Ross, R. S. (2012). The Problem With the Pivot: Obama's New Asia Policy Is Unnecessary and Counterproductive. Foreign Affairs, 71-72.

Liska, G. (1986). Nations in Alliance. The Limits of Interdependence. Baltimore: Baltimore John Hopkins Press.

Chun, C.-S. (2000). Theoretical Approach to Alliance: Implications on the R.O.K.-U.S. Alliance. Journal of International and Area Studies, 71-88.

Singer, D., & Small, M. (1966). Formal Alliances, 1815-1939: a Quantitative Description.

Holsti, O., Hopman, T., & Sullivan, J. (1973). Unity and Disintegration in International Alliances. New York: John Wiley and Sons.

Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security, 3-43.

Bergsman, S. (2001). The Concept of Military Alliance. In E. Reiter, & H. Gärtner, Small States and Alliances (pp. 27-29). Heidelberg: Physica.

Dawn (2010). National Interests and Diplomacy. <http://www.dawn.com/news/846325/national-interests-and-diplomacy> 10 March 2016

Neuchterlein, D. (1976) National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, Vol. 2, No. 3, British Journal of International Studies. p. 246.

Marleku, A (2013) National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol 4, No. 3, pp 415-419.

Morgenthau, Hans J. (1948) *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. 2d ed., rev. & enl. New York: Knopf.

Morrow, J. D. (1991). Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliance. *American Journal of Political Science* Vol.35, No.4, 904-933.

Liberman, P. (2017, Februari). Asymmetric Alliances and Side Payments: Alliance Politics Between Unequal Powers. Retrieved from Academic Works: http://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1892/

Sheehan, M. (1995). *The Balance of Power*. Milton Park: Taylor & Francis.

Allison et al (2011) *Russia and US National Interests*. Washington DC: Centre for the National Interest.

Brookings Institute (1953). *Major Problems of United States' Foreign Policy*. Washington D.C: The Brookings

Institution. <https://www.mod.go.jp/j/publication/other/ronbun/h18/02-02.pdf>

Noboru, Y. (2014, March 10). *On the New National Defense Program Guidelines*. Retrieved from Japan Policy Forum: <https://www.japanpolicyforum.jp/archives/politics/pt20140310004136.html>

Santoso, R. P., & Perwita, A. A. (2016). *The Shift and Continuity of Japanese Defense Policy: Revolutionary Enough?*, 1-22.

Albert, E., & Xu, B. (2016, February 8). *The China-North Korea Relationship*. Council on Foreign Relations. Retrieved from <http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097>

Dawson, C. (2011, December 28). *Japan Lifts Decadeslong Ban on Export of Weapons*. The Wall Street Journal. Retrieved from <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203479104577123710031180408>

Fouse, D. (2011). *Japan's 2010 National Defense Program Guidelines: Coping with the 'Grey Zones'*. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.